

Judul : Heboh tayangan LGBT, ayo regulator, lindungi anak
Tanggal : Minggu, 05 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Heboh Tayangan LGBT Ayo Regulator, Lindungi Anak

SENAYAN mengecam keras tayangan Netflix yang menghadirkan konten Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di film animasi anak. Langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditunggu jika platform asal Amerika Serikat ini terbukti melanggar aturan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, peristiwa ini mendapat perhatian serius dari lembaganya, utamanya terkait konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi publik. Apalagi tayangan LGBT ini ditujukan kepada anak-anak.

"Jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak atau norma kesusilaan, harus ada langkah tegas, termasuk sanksi administratif atau pembatasan distribusi konten," tegas Dave dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Diketahui, serial anak yang diduga mengampanyakan LGBT adalah animasi berjudul *Dead End: Paranormal Park*. Akun X Libs of TikTok pertama kali membagikan klip dari acara animasi tersebut.

"OMG. *Dead End: Paranormal Park*, sebuah acara di Netflix, mempromosikan isu pro-transgender kepada anak-anak. Acara ini diiklankan untuk anak usia 7 tahun. Acara ini dipromosikan di @netflix untuk anak-anak saat ini. Orang tua, hati-hati," tulisnya pada Selasa (30/9).

Unggahan ini lantas diamplifikasi oleh bos Tesla Elon Musk yang memiliki 227 juta pengikut di platform tersebut. "Ini tidak baik," tulis Musk, merespons unggahan tersebut.

Selanjutnya, Elon Musk mengajak seluruh pengikutnya di X untuk membatalkan langganan Netflix mereka usai kontroversi animasi anak yang mengampanyakan LGBT.

Untuk itu, Dave mendorong Komdigi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan evaluasi secara menyeluruh. Harus ada mekanisme kurasi konten digital, termasuk sistem klasifikasi usia dan pengawasan algoritma rekomendasi.

Dave mendukung kebebasan berekspresi dengan adanya keberagaman konten. Tapi Netflix dalam menghadirkan konten harus mengikuti dan berpijak kepada nilai-nilai norma hingga budaya di Indonesia. Termasuk norma sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

"Ketika sebuah platform global seperti Netflix beroperasi di Indonesia, mereka wajib tunduk pada regulasi lokal dan menjaga sensitivitas terhadap konten yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, apalagi jika menyangkut segmen usia anak," tegas politikus Golkar ini.

Komisi I DPR, kata Dave, terbuka untuk membahas penyempurnaan aturan hukum terkait perkembangan teknologi dan dinamika konten digital. Namun pendekatannya harus proporsional, tidak represif, dan tetap menjamin hak publik atas informasi yang sehat.

"Kami mendorong dialog konstruktif antara Pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil agar ekosistem media digital di Indonesia tetap aman, inklusif, dan sesuai dengan jati diri bangsa," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukanta menambahkan, tayangan Netflix yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT dan berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia sangat meresahkan dan bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Sebab tayangan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. ■ TIF